



Kepemimpinan Perempuan Dalam Politik Lokal

(Studi Dinamika Representasi Gender Sherly Laos)

Nazwa Namira Putri Rusdiandi¹, Siti Afra Aafiyah², Valerina Raharjo³,
Aniqotul Ummah⁴

Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: 2410413025@mahasiswa.upnvoj.ac.id, 2410413018@mahasiswa.upnvoj.ac.id,
2410413004@mahasiswa.upnvoj.ac.id, aniqotul.ummah@upnvoj.ac.id,

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 25 Juni 2026

ABSTRACT

Women's participation in local politics in Indonesia has increased after the Reform Era through decentralization and direct regional elections. However, women's representation often remains descriptive and has not fully achieved substantive representation in policymaking (Pitkin, 1967). This study examines the leadership of Sherly Tjoanda in North Maluku as a representation of women's leadership in local politics. The research aims to analyze how her leadership reflects substantive gender representation and how she navigates patriarchal political culture. This study uses a qualitative approach with library research methods. Data were collected from government documents, academic journals, books, and scientific publications related to gender representation and women's leadership (Hlynsdóttir, 2020). The findings show that Sherly Tjoanda promotes policies focusing on education, healthcare, social welfare, and the protection of women and children. Her participatory and empathetic leadership style strengthens inclusive governance, although patriarchal culture and elite political domination remain major challenges (Sitompul et al., 2025). In conclusion, women's political leadership requires adaptive strategies to create inclusive public policies.

Keywords: Women's Leadership, Gender Representation, Local Politics, Patriarchy.

ABSTRAK

Partisipasi perempuan dalam politik lokal di Indonesia meningkat sejak era Reformasi melalui desentralisasi dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun, keterwakilan perempuan masih sering berada pada tahap representasi deskriptif dan belum sepenuhnya mencapai representasi substantif dalam pembuatan kebijakan publik (Pitkin, 1967). Penelitian ini membahas kepemimpinan Sherly Tjoanda di Maluku Utara sebagai bentuk kepemimpinan perempuan dalam politik lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kepemimpinannya mencerminkan representasi gender substantif serta bagaimana ia menghadapi budaya politik patriarki. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh melalui dokumen pemerintah, jurnal ilmiah, buku akademik, dan publikasi terkait representasi gender serta kepemimpinan perempuan (Hlynsdóttir, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sherly Tjoanda menghadirkan kebijakan yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta perlindungan perempuan dan anak. Gaya kepemimpinannya yang partisipatif dan empatik memperkuat pemerintahan yang inklusif, meskipun budaya patriarki dan dominasi elite politik masih menjadi tantangan utama (Sitompul et al., 2025). Kesimpulannya,

kepemimpinan perempuan memerlukan strategi adaptif untuk menghasilkan kebijakan publik yang inklusif.

Kata Kunci: *Kepemimpinan Perempuan, Representasi Gender, Politik Lokal, Patriarki.*

PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi telah membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi perempuan, termasuk dalam ranah politik lokal. Kebijakan desentralisasi dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi momentum penting bagi perempuan untuk terlibat dalam struktur kekuasaan daerah dan proses pengambilan keputusan politik. Dalam konteks demokrasi modern, keterwakilan perempuan tidak hanya dipahami sebagai kehadiran secara formal dalam lembaga politik, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan. Pemerintahan lokal memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan publik sehingga isu representasi gender di tingkat lokal menjadi semakin penting untuk dikaji (Hlynsdóttir, 2020). Namun demikian, peningkatan partisipasi perempuan dalam politik belum sepenuhnya diiringi dengan kemampuan menghadirkan representasi substantif yang benar-benar mencerminkan kepentingan gender dalam praktik pemerintahan.

Secara konseptual, representasi perempuan dalam politik dapat dibedakan menjadi representasi deskriptif dan representasi substantif. Representasi deskriptif berkaitan dengan jumlah atau kehadiran perempuan dalam lembaga politik, sedangkan representasi substantif merujuk pada kemampuan aktor politik perempuan dalam memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya melalui kebijakan publik yang dihasilkan (Pitkin, 1967). Dalam praktik politik di Indonesia, pergeseran dari representasi deskriptif menuju representasi substantif masih menghadapi berbagai hambatan. Dominasi laki-laki dalam struktur politik dan budaya masyarakat menyebabkan perempuan sering kali mengalami keterbatasan dalam memperoleh legitimasi politik maupun ruang pengambilan keputusan strategis (Sitompul et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam politik belum tentu menghasilkan kebijakan yang sensitif terhadap kebutuhan gender.

Selain faktor struktural, budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat turut memperkuat ketimpangan gender dalam politik. Perempuan sering dipersepsikan kurang memiliki kapasitas dalam memimpin urusan publik sehingga lebih banyak ditempatkan pada posisi simbolik dibandingkan strategis. Bahkan ketika perempuan berhasil menduduki jabatan politik, mereka tidak selalu memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan daerah. Tantangan tersebut diperkuat oleh norma sosial yang membatasi peran perempuan di ruang publik, sehingga perempuan harus menghadapi dilema antara tuntutan budaya tradisional dan kebutuhan untuk berpartisipasi dalam politik modern (Maeda et al., 2025). Dengan demikian, perjuangan perempuan dalam politik tidak hanya berkaitan dengan akses formal terhadap kekuasaan, tetapi juga kemampuan menavigasi struktur sosial dan budaya yang masih bias gender.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa desentralisasi politik telah memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam politik lokal. Dewi (2013) menjelaskan bahwa penerapan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik daerah, meskipun jumlah perempuan yang berhasil menduduki jabatan strategis masih relatif terbatas. Penelitian Lestari et al. (2024) menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan cenderung meningkat di wilayah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, walaupun penerimaan tersebut masih dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Sementara itu, Baharudin (2022) menyoroti bahwa partai politik belum sepenuhnya memberikan dukungan substantif terhadap perempuan karena kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan sering kali hanya dijalankan sebagai formalitas administratif. Penelitian Zahra (2019) juga menemukan bahwa keberhasilan perempuan dalam politik lokal dalam beberapa kasus masih berkaitan dengan jaringan elite dan praktik politik dinasti. Selain itu, Mariana et al. (2023) menegaskan bahwa keberhasilan perempuan dalam politik tidak cukup diukur dari jumlah keterwakilan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan representasi substantif melalui kebijakan yang responsif terhadap isu gender dan kelompok marginal.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kepemimpinan perempuan dalam politik lokal, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek representasi deskriptif, kebijakan afirmatif, dan hambatan struktural perempuan dalam politik. Penelitian yang secara khusus mengkaji dinamika representasi gender dalam praktik kepemimpinan perempuan di tingkat lokal, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, masih relatif terbatas. Selain itu, kajian mengenai bagaimana pemimpin perempuan menghadapi budaya patriarki sekaligus membangun kebijakan yang responsif terhadap kepentingan gender juga belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian mengenai bagaimana perempuan sebagai aktor politik lokal menjalankan kepemimpinannya secara substantif melalui kebijakan dan keputusan politik yang diambil.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada kepemimpinan Sherly Laos dalam politik lokal sebagai studi mengenai dinamika representasi gender. Kepemimpinan Sherly Laos menjadi menarik untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana perempuan sebagai aktor politik menghadapi tantangan struktural dan kultural sekaligus membangun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan dan keputusan politik yang diambil oleh Sherly Laos mencerminkan representasi dan kepentingan gender dalam pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami strategi kepemimpinan perempuan dalam menghadapi dominasi budaya patriarki di ruang politik lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian gender dan politik, khususnya mengenai relasi antara kepemimpinan perempuan, representasi substantif, dan pemerintahan lokal yang inklusif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai kepemimpinan perempuan dalam politik lokal memerlukan pemahaman yang menyentuh dimensi makna, konteks, dan dinamika sosial yang tidak cukup dijelaskan melalui angka semata. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai sumber tertulis secara sistematis guna membangun argumen analitis yang koheren (Rahardjo, 2017). Sumber data terdiri dari dua kategori. Pertama, dokumen resmi pemerintah sebagai sumber primer, yaitu data statistik daerah dari BPS Maluku Utara (2023). Kedua, literatur ilmiah sebagai sumber sekunder yang mencakup artikel jurnal nasional dan internasional, buku referensi akademik, serta laporan lembaga resmi. Pemilihan literatur didasarkan pada dua kriteria, yakni relevansi substansial dengan tema kepemimpinan perempuan dan representasi gender, serta rentang tahun terbit dengan penekanan pada sumber-sumber yang terbit dalam 10 tahun terakhir. Analisis data dilakukan mengacu pada model analisis kualitatif yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (Rijali, 2018). Ketiga tahap ini berjalan secara iteratif antara data literatur dan kerangka teori representasi gender (Pitkin, 1967; Phillips, 1995), sehingga temuan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dan Keputusan Politik Sherly Tjoanda dalam Pemerintahan Daerah

Kepemimpinan perempuan dalam politik lokal tidak hanya dinilai dari keberhasilan memperoleh posisi kekuasaan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kebijakan yang mencerminkan representasi gender secara substantif. Dalam konteks ini, kepemimpinan Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara periode 2025–2030 menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana perempuan sebagai aktor politik mampu menghadirkan pola kepemimpinan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sherly Tjoanda tercatat sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara sekaligus salah satu figur perempuan yang muncul dalam dinamika politik lokal pasca-Pilkada 2024 (Kompas.com, 2025). Keberhasilannya dalam memenangkan kontestasi politik mencerminkan adanya perubahan pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di tingkat daerah serta menunjukkan berkembangnya dinamika representasi gender dalam politik lokal.

Dalam pelaksanaan pemerintahannya, Sherly Tjoanda lebih menitikberatkan kebijakan pada aspek kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak. Orientasi tersebut tercermin dalam arah pembangunan daerah yang dimuat dalam RPJMD Maluku Utara 2025–2029 melalui program pendidikan gratis, Universal Health Coverage (UHC), pengembangan infrastruktur dasar, transformasi digital, dan penguatan sektor sosial masyarakat (Malut Center, 2025). Kebijakan tersebut memperlihatkan kecenderungan pemerintahan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat bawah dan kelompok rentan. Selain itu, proses penyusunan kebijakan dilakukan melalui

konsultasi publik dan musyawarah pembangunan daerah, sehingga menunjukkan adanya upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan inklusif. Kondisi ini sejalan dengan konsep representasi substantif yang menekankan pentingnya kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakili (Pitkin, 1967).

Representasi gender dalam kepemimpinan Sherly Tjoanda juga tampak melalui perhatian terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Pada peringatan Hari Kartini tahun 2025, Sherly menyampaikan bahwa persoalan pendidikan serta perlindungan perempuan dan anak di Maluku Utara masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan pemerintah daerah (MalutPost.com, 2025). Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak melalui mekanisme pengaduan yang lebih responsif. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan memiliki kecenderungan lebih sensitif terhadap persoalan sosial yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam kebijakan publik daerah. Temuan ini selaras dengan pendapat Mariana et al. (2023) yang menyatakan bahwa representasi substantif perempuan tercermin melalui kemampuan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada isu gender dan kelompok marginal.

Selain itu, gaya kepemimpinan Sherly Tjoanda memperlihatkan pendekatan yang humanis dan berbasis empati. Dalam beberapa kesempatan, ia menyatakan bahwa dirinya memimpin dengan sudut pandang “seorang ibu” yang memahami kebutuhan perempuan, anak, dan keluarga (Malutline.com, 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa identitas gender dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi membangun legitimasi politik di tengah budaya patriarki yang masih kuat di Maluku Utara. Pendekatan kepemimpinan seperti ini sejalan dengan konsep *gendered leadership* yang menjelaskan bahwa pemimpin perempuan cenderung menerapkan pola kepemimpinan yang komunikatif, partisipatif, dan lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial (Hlynsdóttir, 2020).

Meskipun demikian, kepemimpinan Sherly Tjoanda juga memperlihatkan adanya tantangan struktural dan kultural yang masih dihadapi perempuan dalam politik lokal. Kemenangan Sherly dalam Pilkada tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik mending suaminya, Benny Laos, yang sebelumnya memiliki basis kekuatan politik di Maluku Utara (Kompas.com, 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa perempuan dalam politik lokal sering kali masih memperoleh legitimasi melalui jaringan elite dan hubungan keluarga politik. Fenomena tersebut memperkuat temuan Zahra (2019) yang menyatakan bahwa keberhasilan perempuan dalam politik lokal pada beberapa kasus masih berkaitan dengan praktik politik dinasti dan jaringan kekuasaan elite. Dengan demikian, representasi perempuan dalam politik lokal dapat dipahami sebagai kondisi yang dilematis karena di satu sisi menunjukkan kemajuan demokrasi gender, tetapi di sisi lain masih dipengaruhi oleh pola kekuasaan patrimonial.

Di samping itu, kepemimpinan Sherly Tjoanda juga mendapatkan kritik terkait pengelolaan sumber daya alam dan hubungan pemerintah daerah dengan sektor pertambangan di Maluku Utara. Sejumlah kelompok masyarakat sipil

menilai bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya responsif terhadap persoalan lingkungan dan konflik masyarakat adat di wilayah pertambangan. Kritik tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak secara otomatis menghasilkan kebijakan yang sepenuhnya berpihak pada kelompok marginal. Dengan kata lain, representasi substantif gender tetap dipengaruhi oleh struktur ekonomi-politik daerah, kepentingan elite, dan orientasi pembangunan berbasis industri ekstraktif. Hal ini sejalan dengan pendapat Sitompul et al. (2025) yang menyatakan bahwa dominasi struktur politik dan ekonomi masih menjadi hambatan bagi perempuan dalam mewujudkan representasi substantif secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan dan keputusan politik Sherly Tjoanda dalam pemerintahan daerah menunjukkan adanya upaya menghadirkan representasi gender secara substantif melalui kebijakan sosial, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak. Kepemimpinannya juga mencerminkan adanya perubahan dalam penerimaan masyarakat terhadap perempuan sebagai aktor politik di tingkat lokal. Namun demikian, praktik kepemimpinan tersebut tetap dihadapkan pada tantangan berupa budaya patriarki, dominasi jaringan elite politik, serta kompleksitas kepentingan ekonomi-politik daerah. Oleh karena itu, dinamika kepemimpinan Sherly Tjoanda menunjukkan bahwa representasi gender dalam politik lokal merupakan proses yang kompleks dan terus dinegosiasikan antara identitas gender, kekuasaan politik, dan struktur sosial masyarakat.

Dinamika Kepemimpinan Sherly Tjoanda di Tengah Budaya Politik Patriarki

Kepemimpinan Sherly Tjoanda dalam ranah politik lokal menunjukkan interaksi yang rumit antara kehadiran perempuan secara resmi dalam struktur kekuasaan dan usaha nyata untuk memberikan representasi yang mendalam. Pitkin (1967) mengkategorikan representasi menjadi jenis formal, deskriptif, simbolis, serta substantif, di mana yang terakhir mengedepankan tindakan konkret seorang pemimpin dalam membela kepentingan kelompok yang diwakilinya. Dalam konteks kepemimpinan Sherly Tjoanda, representasi substantif ini terlihat jelas dalam kebijakan dan program yang ia usulkan, yang tidak hanya memenuhi kuota gender atau simbolis, tetapi juga memperhatikan kebutuhan perempuan serta kelompok yang rentan di masyarakat.

Budaya politik patriarki di tingkat lokal terus menjadi kendala besar bagi Sherly Tjoanda. Kekuasaan laki-laki dalam ruang pengambilan keputusan dan norma sosial yang menganggap perempuan harus berada pada peran tradisional mengharuskan Sherly untuk menunjukkan kemampuan yang lebih dibandingkan rekan lelaki. Situasi ini sejalan dengan temuan Hoerul Nisa et al. (2026), yang mengkaji posisi Sherly sebagai minoritas ganda dalam konteks patriarki dalam politik lokal. Meskipun menghadapi berbagai tantangan struktural, Sherly berhasil mengatasi kondisi ini dengan pendekatan kepemimpinan yang fleksibel, termasuk membangun jaringan komunitas perempuan serta mengedepankan kerjasama antar lembaga.

Representasi substantif yang diupayakan Sherly terwujud dalam kebijakan yang menguntungkan perempuan dan kelompok rentan. Beberapa program unggulannya meliputi peningkatan akses layanan kesehatan bagi ibu dan perempuan, pelatihan kewirausahaan untuk perempuan, serta penguatan organisasi perempuan di tingkat desa. Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinannya mampu mengubah aspirasi kelompok yang diwakilinya menjadi kebijakan yang nyata, sejalan dengan prinsip Pitkin yang menekankan bahwa representasi substantif membutuhkan tindakan politik yang konkret (Aulia et al., 2026).

Selain dari aspek kebijakan, Sherly Tjoanda juga menghadapi berbagai tantangan normatif dari budaya patriarki yang menghalangi peran perempuan di ranah publik. Pandangan masyarakat dan elit politik terhadap perempuan sebagai pemimpin masih terjebak dalam bias gender, yang bisa membatasi pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan penting. Namun, beliau mengantisipasi situasi ini dengan pendekatan kolaboratif, melibatkan organisasi perempuan, lembaga pendidikan, dan mitra pembangunan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi politiknya, tetapi juga memperluas kapasitas advokasi isu gender di tingkat lokal (Widiyanti et al., 2026).

Keberhasilan representasi substantif yang dilakukan oleh Sherly Tjoanda tidak diukur dari jumlah kebijakan yang dihasilkan, melainkan dari kualitas dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan dan kelompok marginal. Pendekatan yang inklusif dan orientasi aksi yang diterapkannya menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dapat memberikan perbedaan signifikan dalam kualitas kebijakan publik, serta memperkuat demokrasi lokal yang lebih responsif terhadap gender (Magister Yuliana dan Hermawati, 2025; Izdiha, 2025).

Selain itu, Sherly Tjoanda memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk memperluas jangkauan dalam komunikasi politik. Melalui media seperti Instagram dan TikTok, ia mampu membangun narasi kepemimpinan yang menekankan pentingnya inklusivitas dan pemberdayaan perempuan, sekaligus membentuk persepsi publik yang lebih baik mengenai kepemimpinan perempuan di daerah (Nurshiva et al., 2026). Strategi ini menunjukkan bagaimana representasi substantif dapat diperkuat melalui inovasi dalam komunikasi, terutama di tengah budaya patriarki yang masih kuat.

Dengan demikian, kepemimpinan Sherly Tjoanda menunjukkan bahwa wanita dalam politik lokal tidak hanya memerlukan akses resmi, tetapi juga keterampilan strategis untuk menghadapi struktur sosial yang mendominasi laki-laki. Dinamika ini menegaskan bahwa representasi politik wanita yang efektif seharusnya mengintegrasikan legitimasi resmi, strategi kepemimpinan yang fleksibel, serta fokus kebijakan yang peka terhadap masalah gender. Keberhasilan Sherly menjadi contoh konkrit bagaimana pemimpin perempuan dapat menghasilkan perubahan yang signifikan, sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Tantangan Implementasi Kebijakan yang Responsif Gender di Maluku Utara

Implementasi kebijakan responsif gender di Maluku Utara jauh lebih kompleks dari sekadar soal administrasi. Ada struktur sosial dan politik yang sudah lama mengakar, dan inilah yang menjadi medan sesungguhnya. Setidaknya empat tantangan utama ditemukan dalam kajian ini. Pertama, posisi Sherly Tjoanda sebagai pemimpin dengan atribut *triple minority* perempuan, minoritas etnis, sekaligus minoritas agama membuat kebijakan responsif gender yang ia dorong rentan dipersepsikan sebagai agenda kelompok tertentu, bukan sebagai kebutuhan pembangunan inklusif. Identitas masih punya pengaruh kuat dalam membentuk atau meruntuhkan legitimasi kebijakan di tingkat lokal (Lestari et al., 2026; Widiyanti et al., 2026).

Meski keterwakilan perempuan dalam birokrasi meningkat secara kuantitatif, posisi-posisi strategis masih dikuasai laki-laki. Ada *glass ceiling* yang bekerja secara sistematis, berakar pada budaya patriarki dan konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada peran subordinat (Walby, 1990). Akibatnya, kebijakan yang diinisiasi pemimpin perempuan kerap tersandung di level pelaksanaan karena aparatur birokrasi belum sepenuhnya melepas pola pikir patriarkisnya (Artisa, 2014). Struktur ekonomi Maluku Utara yang bertumpu pada industri ekstraktif terutama hilirisasi nikel tidak otomatis menciptakan keadilan gender. Sektor pertambangan yang bersifat maskulin lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki, sementara perempuan justru lebih sering menanggung dampak negatifnya (Lestari et al., 2026). Implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) masih jauh dari optimal. Banyak perangkat daerah yang belum mampu mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan anggaran, sehingga program pemberdayaan perempuan sering berakhir sebagai kegiatan simbolik (Hadi, 2024; Mariana et al., 2023).

Tabel 3. Peta Tantangan Implementasi Kebijakan Responsif Gender di Maluku Utara

NO	Tantangan	Faktor Penyebab	Dampak
1	Triple minority	Dikotomi identitas publik	Resistensi legitimasi kebijakan
2	Glass ceiling	Patriarki & stereotip gender	Hambatan perempuan di posisi strategis
3	Ekonomi ekstraktif	Sektor maskulin dominan	Ketimpangan manfaat membangun
4	ARG belum optimal	Kapasitas aparatur rendah	Program bersifat simbolik

Sumber: diolah penulis dari Artisa (2014); Hadi (2024); Lestari et al. (2026); Mariana et al. (2023); Walby (1990); Widiyanti et al. (2026).

Secara keseluruhan, tantangan ini bersifat sistemik dan multidimensional. Kepemimpinan Sherly Tjoanda punya potensi strategis untuk mendorong perubahan, namun keberhasilannya bergantung pada kemampuan membangun legitimasi publik, bernegosiasi dengan elit lokal, dan mendorong reformasi

birokrasi yang benar-benar sensitif gender. Tanpa konsistensi di semua lini itu, kebijakan yang lahir berisiko hanya bersifat populis bukan transformatif.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Sherly Tjoanda dalam ranah politik lokal Maluku Utara sukses dalam memberikan representasi yang berarti bagi perempuan, meskipun masih ada budaya patriarki dan tantangan struktural yang mendalam. Sherly berhasil menyalurkan harapan kelompok yang terpinggirkan, terutama perempuan dan anak-anak, ke dalam kebijakan nyata melalui program-program di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan bagi perempuan dan anak. Pendekatan kepemimpinannya yang melibatkan partisipasi, bersifat humanis, dan berfokus pada empati semakin memperkuat posisi politik perempuan di level lokal dan juga menunjukkan bahwa keberhasilan dalam representasi gender yang efektif memerlukan aksi nyata, bukan sekadar keberadaan yang simbolis. Grafis dinamika kepemimpinan Sherly Tjoanda juga mengindikasikan bahwa suksesnya representasi yang berarti dipengaruhi oleh identitas gender, jaringan politik, serta hubungan dengan struktur sosial dan ekonomi daerah. Temuan tambahan dari penelitian ini adalah bahwa pencapaian perempuan dalam politik lokal memerlukan pendekatan yang adaptif untuk mengatasi rintangan patriarki, termasuk dengan menjalin kolaborasi dengan komunitas, institusi pendidikan, dan mitra pembangunan, serta memanfaatkan media digital untuk memperluas saluran komunikasi politik. Penelitian ini merekomendasikan agar studi selanjutnya mengkaji lebih dalam tentang bagaimana media digital berpengaruh terhadap legitimasi dan dampak kepemimpinan perempuan di lingkungan politik lokal, serta mengeksplorasi cara-cara implementasi Anggaran Responsif Gender yang lebih efektif untuk meningkatkan representasi yang berarti di daerah. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dr. Aniqotul Ummah, S.Sos., M.Sos. dan Dr. Nurdin, S.Pd., M.Si. selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan masukan dalam proses penulisan artikel ini. Terima kasih juga kepada redaksi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan karya ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aulia, D. F., Rismayani, A., & Indriyani, I. A. (2026). Framing gender dalam politik digital: Representasi kepemimpinan Sherly Tjoanda dalam pemberitaan dan platform sosial. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 5(1), 64–81.
- Artisa, R. A. (2014). Hambatan kepemimpinan perempuan dalam birokrasi Pemerintah Provinsi DIY. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 5(1), 8–15.
- Badan Pusat Statistik Maluku Utara. (2023). *Maluku Utara dalam angka*.
- Baharudin. (2022). Peran partai politik dalam meningkatkan representasi perempuan di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 4(2), 87–101.
- Beriansyah, A., et al. (2022). Modal sosial dan jaringan politik perempuan dalam kontestasi politik lokal. *Jurnal Politik Lokal*, 7(1), 55–70.

- Hoerul Nisa, B. S., Putri, S. S., & Indriyany, I. A. (2026). Triple minority dalam ruang patriarki: Gendered leadership Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion*, 5(1), 1-16.
- Izdiha, A. (2025). Wajah politik perempuan: Studi etnografi representasi suara perempuan. *Jurnal Politik dan Gender*, 7(1), 33-50.
- Lestari, A. C. M., dkk. (2026). Feminisasi kepemimpinan atau politik elit? Analisis gender terhadap kepemimpinan Sherly Tjoanda dalam pembangunan ekonomi Maluku Utara. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(2), 375-385.
- Lestari, D., Nugroho, A., & Prasetyo, R. (2024). Persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam politik lokal di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik Indonesia*, 8(1), 45-60.
- Mariana, D., Fitriani, S., & Wibowo, A. (2023). Representasi politik perempuan dan kebijakan responsif gender di Indonesia. *Jurnal Harkat*, 19(1), 1-12.
- Machmud, R. (2018). Kapasitas kepemimpinan perempuan dalam politik lokal Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 22(3), 201-215.
- Maeda, K., et al. (2025). Women's participation and challenges in local governance: A socio-political analysis. *Journal of Local Government Studies*, 12(2), 145-162.
- Magister Yuliana, & Hermawati, S. (2025). Evolusi representasi politik perempuan di tingkat lokal Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Sosial dan Politik*, 12(3), 45-62.
- Mariana, D., Putri, S., & Hidayat, M. (2023). Representasi substantif perempuan dalam kebijakan publik daerah. *Jurnal Gender dan Demokrasi*, 6(1), 21-35.
- Mulawarman, S., Saputra, I., Banggu, M., Tusriadi, & Amalia, D. R. (2025). Kemenangan pasangan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sahe sebagai representasi kelompok minoritas pada Pilkada Maluku Utara. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 323-342.
- Nurshiva, S., Panuju, R., & Prasetyo, I. J. (2026). Penggunaan Instagram dan TikTok sebagai media komunikasi politik Sherly Tjoanda dengan konstituennya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Prastio, R., et al. (2021). Sensitivitas kepemimpinan perempuan terhadap kebijakan sosial di tingkat daerah. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 5(2), 88-102.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah*, 17(33), 81-95.
- Sitompul, H., Ginting, B. C., Pelawi, E. R. A. B., Ramadhan, I. U., Ramadhan, S. A. P., Anadea, S., Manurung, R., & Annisa, S. (2025). Dominasi laki-laki dalam politik Indonesia: Hambatan menuju ketercapaian representasi substantif perempuan di parlemen. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(5), 541-556.
- Widiyanti, A., Damayanti, N. A., & Indriyani, I. A. (2026). Identity-based challenges in the political leadership of Sherly Tjoanda in North Maluku. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Widiyanti, A., dkk. (2026). Hambatan identitas kepemimpinan politik Sherly Tjoanda di Maluku Utara. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(8), 56-68.
- Zahra, N. (2019). Politik dinasti dan kepemimpinan perempuan dalam pilkada Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 112-126.

- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243–262.
- Levina, E. Y., Kutuev, R. A., Balakhnina, L. V., Tumarov, K. B., Chudnovskiy, A. D., & Shagiev, B. V. (2016). The Structure of the Managerial System of Higher Education's Development. *International Journal Of Environmental & Science Education*, 11(15), 8143–8153.
- Laal, M. (2011). Knowledge Management in Higher Education. *Procedia Computer Science*, 3, 544–549.
- Budiyanto, M. A. K., Waluyo, L., & Mokhtar, A. (2016). Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran di Pendidikan Dasar di Malang. *Proceeding Biology Education Conference*, 13(1), 48.
- Hadi, H. (2024). Implementasi dan tantangan anggaran responsif gender: Studi literatur. *IAPA International Conference Proceedings*.
- Blackburn, S. (2004). *Women and the state in modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Dewi, K. H. (2013). *Indonesian women and local politics: Islam, gender and networks in post-Suharto Indonesia*. NUS Press.
- Hlynsdóttir, E. M. (2020). *Local governance and gender equality*. Edward Elgar Publishing.
- Phillips, A. (1995). *The politics of presence*. Oxford University Press.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
- Phillips, A. (1995). *The politics of presence*. Oxford University Press.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
- Rahardjo, M. (2017). *Studi kasus dalam penelitian kualitatif: Konsep dan prosedurnya*. Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Suryakusuma, J. (2011). *Ibuisme negara: Konstruksi sosial keperempuanan Orde Baru*. Komunitas Bambu.
- Swers, M. L. (2002). *The difference women make: The policy impact of women in Congress*. University of Chicago Press.
- Hatum, A. (2010). *Next Generation Talent Management: Talent Management to Survive Turmoil*. London: Palgrave Macmillan.
- Gottschalk, P. (2005). *Strategic Knowledge Management Technology*. Hershey PA: Idea Group Publishing.
- .